

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
<i>ABSTRACT</i>.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
1. Spesifikasi Penelitian.....	17
2. Metode Pendekatan.....	18
3. Tahap Penelitian.....	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Alat Pengumpulan Data.....	20
6. Analisis Data.....	20
7. Lokasi Penelitian.....	21
8. Jadwal Penelitian.....	21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA

A. Perbankan Pada Umumnya	24
1. Pengertian Perbankan	24
2. Pengertian Surat Berharga.....	30
3. Macam-macam Surat Berharga	33
B. Bilyet Giro Pada Umumnya.....	35
1. Pengertian Bilyet Giro.....	35
2. Syarat sahnya Penerbitan Bilyet Giro.....	37
3. Penolakan Dan Pembatalan Bilyet Giro.....	38
4. Jenis-jenis Cek/Bilyet Giro.....	39
C. Alat Pembayaran.....	40
1. Pengertian Alat Pembayaran.....	40
2. Syarat Sahnya Alat Pembayaran	41
3. Jenis-jenis Alat Pembayaran.....	43
D. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan Pada Umumnya.....	44
1. Latar Belakang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.....	44
2. Fungsi, Tugas Dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	45
3. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank	47

BAB III PELAKSANAAN PEMBERIAN BILYET GIRO KOSONG OLEH NASABAH BANK

A. Proses Pemberian Bilyet Giro Kosong.....	50
1. Proses pemberian bilyet giro kosong sebagai alat pembayaran oleh penjual ke pembeli.....	50
2. Proses penerbitan dan penggunaan Bilyet Giro dalam Praktek Perbankan.....	54
B. Akibat Hukum Yang Dihadapi Oleh Pemberi Bilyet Giro	58

C. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Bilyet Giro Yang Dinyatakan Oleh Bank BCA Bahwa Dana Tidak Tersedia/Kosong.....	62
---	----

BAB IV PENYELESAIAN HUKUM TENTANG PEMBERIAN BILYET GIRO KOSONG YANG DANA TIDAK MENCUKUPI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

A. Hubungan Hukum Penerbit Dan Penerima Bilyet Giro Kosong Dalam Penggunaan Bilyet Giro Kosong Sebagai Alat Pembayaran.....	71
B. Pertanggungjawaban Bank Terhadap Penerbit Bilyet Giro Kosong oleh Nasabah Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.....	79
C. Penyelesaian Hukum Dari Penggunaan Bilyet Giro Kosong Yang tidak Mencukupi Untuk Melakukan Pembayaran.....	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN